

## Studi Identifikasi Faktor Faktor Pendukung Dan Penghambat Pencapaian Target Spbe Di Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Putri Puspita Dewi<sup>1</sup>, Dodie Tricahyono<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, pedepuspita@student.telkomuniversity.ac.id

<sup>2</sup> Manajemen Bisnis Telekomunikasi & Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Indonesia, dodietrichahyono@telkomuniversity.ac.id

### **Abstract**

*The utilization of data and correspondence innovation in government exercises is a type of e-government execution. The execution of e-government in Indonesia was developed with the issuance of Official Guideline Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Frameworks (SPBE). During the 5 years that the guidelines connected with SPBE were distributed, a few deterrents were found in the execution cycle, guidelines and assets so they couldn't accomplish the greatest objective. The point of this exploration is to show the estimation cycle of the SPBE development level record esteem in the Tasikmalaya Regional Government. The examination utilized in this exploration alludes to PERMENPAN Number 59 of 2020. Comprises of 47 markers that will evaluate development levels as indicated by current information and conditions. The screening was completed with witnesses or sources associated with shrewd administration the board in the city of Tasikmalaya to find solutions to every pointer. In light of the consequences of executing the savvy administration aspect in Tasikmalaya City utilizing the SPBE record, it shows the reception and execution of inside strategies connected with SPBE engineering, information the executives, data security, and ICT reviews. Proficient, straightforward and responsive regulatory administrations have been given to the general population through complex data innovation. The City of Tasikmalaya has prevailed with regards to building a strong groundwork in the administration of unstable materials with viability, productivity, security and better help than the local area. Tasikmalaya City, in carrying out the savvy administration aspects, has accomplished an excellent predicate in the SPBE file, demonstrating that the regional government has taken on a powerful shrewd administration approach.*

*Keywords-e-government, smart city, smart governance, SPBE, governance, Tasikmalaya*

---

### **Abstrak**

Pemanfaatan inovasi data dan persuratan dalam kegiatan pemerintahan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan e-Government. Penyelenggaraan e-Government di Indonesia dikembangkan dengan diterbitkannya Pedoman Resmi Nomor 95 Tahun 2018 tentang Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Selama 5 tahun diterbitkannya pedoman terkait SPBE, ditemukan beberapa hambatan dalam siklus pelaksanaan, pedoman dan aset sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang maksimal. Tujuan dari eksplorasi ini adalah untuk menunjukkan siklus estimasi penghargaan tingkat pengembangan SPBE di Pemerintah Daerah Tasikmalaya. Pemeriksaan yang digunakan dalam eksplorasi ini mengacu pada PERMENPAN Nomor 59 Tahun 2020. Terdiri dari 47 penanda yang akan menilai tingkat perkembangan berdasarkan informasi dan kondisi terkini. Penyaringan tersebut dilengkapi dengan saksi-saksi atau narasumber yang terkait dengan kecerdikan pengurus Kota Tasikmalaya untuk mencari solusi dari setiap petunjuk. Mengingat konsekuensi pelaksanaan aspek administrasi cerdas di Kota Tasikmalaya dengan menggunakan catatan SPBE, menunjukkan penerimaan dan pelaksanaan strategi internal yang berkaitan dengan rekayasa SPBE, informasi penyelenggara, keamanan data, dan tinjauan ICT. Administrasi regulasi yang cakap, lugas, dan responsif telah diberikan kepada masyarakat umum melalui inovasi data yang kompleks. Kota Tasikmalaya telah unggul dalam membangun landasan yang kuat dalam pengelolaan bahan-bahan yang tidak stabil dengan kelayakan, produktivitas, keamanan dan dukungan yang lebih baik dibandingkan daerah setempat. Kota Tasikmalaya dalam menjalankan aspek administrasi cerdas berhasil meraih predikat sangat baik dalam berkas SPBE, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan pendekatan administrasi cerdas yang ampuh.

*Kata Kunci-e-government, smart city, smart governance.SPBE, governance, Tasikmalaya*

---

I. PENDAHULUAN

Kota Tasikmalaya yang juga dikenal dengan sebutan “Mutiar Priangan Timur” terletak di Provinsi Jawa Barat. Kota Tasikmalaya akan berpenduduk 731.048 jiwa pada tahun 2021, dengan kepadatan penduduk 4.260 jiwa per km2. Sebagai kota berkembang, kegiatan bisnis, perdagangan, dan jasa juga semakin berkembang. Praktis 70% komunitas bisnis, fokus pertukaran dan administrasi, serta fokus modern di Priangan Timur berada di Kota Tasikmalaya. Karena Kota Tasikmalaya merupakan rumah bagi lebih dari sepertiga perekonomian Jawa Barat, wilayah Priangan Timur mencakup 40% dari total wilayah negara. Inisiatif Kota Cerdas yang inovatif dari ekosistem kota bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah dan meningkatkan kesejahteraan manusia dan masyarakat.

Pemerintahan yang cerdas merupakan salah satu unsur kota cerdas yang mengedepankan pendekatan penanganan kota yang menitik beratkan pada perluasan tugas pemerintah sebagai pihak yang memberikan bantuan kepada daerah setempat, dan dengan menempatkan daerah setempat sebagai anggota dan objek perbaikan, dengan ini pemerintahan dapat meningkatkan kapasitas sebenarnya. diklaim dan membatasi hambatan atau permasalahan yang dihadapi (Hius, 2013). Aspek administrasi yang cerdas merupakan salah satu aspek yang sedang berjalan di Indonesia dan telah dituangkan melalui Pedoman Resmi No.95 Tahun 2018 tentang Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Tasikmalaya, saat ini sudah ada beberapa kantor pemerintahan di Kota Tasikmalaya yang telah menjalankan Strategi SPBE dan yang fokus tugasnya adalah Dinas Persuratan dan Data Kota Tasikmalaya.

Tabel 1. 1 Nilai Indeks SPBE Kota Tasikmalaya

Domain dan Aspek Penilaian	Indeks Domain 2023	Indeks Domain 2022
Domain 1 – Kebijakan SPBE	4,20	3,20
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	2,70	2,00
Domain 3 – Manajemen SPBE	2,09	1,36
Domain 4 – Layanan SPBE	3,69	3,26
<b>Indeks SPBE</b>	<b>3,25</b>	<b>2,62</b>

Sumber: Diolah Oleh Penulis (2024)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa valuasi file SPBE pada tahun 2023 adalah sebesar 3,25, hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat perkembangan pelaksanaan SPBE berada pada kelas “upside”, padahal pada tahun 2022 hanya memperoleh nilai sebesar 2,62, dan itu menyiratkan bahwa itu termasuk dalam klasifikasi "benar-benar hebat". Dalam pendalaman SPBE kali ini menyinggung Metodologi Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai PERMENPANRB No.59 Tahun 2020 yang meliputi 4 bidang yang terdiri dari penataan dalam SPBE, penatausahaan SPBE, pengurus SPBE, dan penatausahaan SPBE. Nilai rekor SPBE pada tahun 2023 adalah sebesar 3,25, hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan SPBE berada pada tingkat perkembangan yang baik, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah mengalami kemajuan besar dalam melakukan teknik berbasis inovasi data untuk lebih meningkatkan produktivitas, keterbukaan dan sifat keterbukaan informasi. administrasi publik. . Meskipun demikian, masih ada peluang untuk menjadi lebih baik di wilayah tertentu guna mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi secara umum.

Tingkat perkembangan Pemerintahan Publik dalam Kerangka Alternatif Pemerintahan e-Government (SPBE) pada tahun 2022 dinilai berbeda karena pada tahun 2023 dengan rekor nilai 3,69 mendapat firasat “luar biasa”, sedangkan pada tahun 2022 mendapat firasat “luar biasa”. . file dengan nilai 3,26 yang berarti “sangat baik”. Namun hal ini menunjukkan bahwa keduanya menawarkan penyelenggaraan negara, mulai dari pengorganisasian, perencanaan hingga pengendalian internal, yang berlangsung pada tingkat perkembangan yang tinggi. Setiap tanda yang terkait dengan pengendalian pengawasan, misalnya pengelolaan personalia, pengelolaan barang milik negara, dan tanggung jawab hierarki pelaksanaan, juga menunjukkan tingkat perkembangan yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SPBE berhasil meningkatkan produktivitas, kejelasan, dan akuntabilitas pengelolaan instansi

pemerintah. Lebih lanjut, tingkat perkembangan yang secara umum sangat baik ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE telah memberikan dampak positif bagi perkembangan selanjutnya para pengambil kebijakan secara luas.

Pada penelitian ini, SPBE yang sedang berjalan diperlukan evaluasi berkala untuk mengetahui tingkatan kemampuan dari SPBE pada Kota Tasikmalaya. Adapun hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dilakukan penilaian pada setiap indikator dan bobot domain, bobot aspek kemudian hasil dari penilaian tersebut di analisis serta dilakukan finalisasi. Implementasi Smart Government di Kota Tasikmalaya dihadapkan pada beberapa faktor penghambat, termasuk alokasi anggaran yang tidak mencukupi, tantangan dalam manajemen risiko TI, kurangnya koordinasi antar tim, kesiapan SDM yang kurang, kendala dalam penerapan standar, dan perubahan budaya organisasi yang sulit. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pembangunan Smart Governance di Kota Tasikmalaya dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Selain itu, Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kota Tasikmalaya menjadi parameter yang relevan untuk menilai sejauh mana penerapan teknologi ini telah berhasil. Faktor-faktor seperti ketersediaan infrastruktur teknologi, tingkat partisipasi masyarakat, kualitas layanan elektronik, serta keamanan data menjadi bagian integral dari penilaian ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kota Tasikmalaya dalam pengimplementasian SPBE di Kota Tasikmalaya. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Studi Identifikasi Faktor Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Target SPBE di Kota Tasikmalaya Tahun 2024”

## II. METODE PENELITIAN

Maksud dari penelitian ini adalah untuk membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan Kerangka Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada suatu Organisasi Pemerintah Daerah/Provinsi. Strategi pemeriksaan yang digunakan adalah eksplorasi subyektif berdasarkan analisis kontekstual. Investigasi kontekstual merupakan strategi eksplorasi untuk menyelami lebih jauh pusat ujian. Penelitian dibantu melalui pertemuan, persepsi dan implikasi dengan berkonsentrasi pada laporan (Dawson, 2015). Penelitian yang mencakup pertanyaan dan penyelidikan informasi yang dikumpulkan secara induktif dan ilmuwan menguraikan pentingnya informasi yang diperoleh. Penyelidikan dalam pemeriksaan subyektif berpusat pada alasan penentuan eksplorasi atau penyelidikan fokus (Cresswell, 2009). Hasil penelitian adalah informasi abstrak yang harus dibedah dan digambarkan untuk mencapai tujuan yang tepat. Untuk menghindari subjektivitas informasi yang diperoleh, dilakukan triangulasi informasi atau pengesahan kebenaran informasi dari berbagai sumber.

Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah Cross Sectional, karena pengumpulan data dilakukan dalam satu periode dan data yang diperoleh itu diolah, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan (Indrawati, 2015:118). Sehingga penelitian ini termasuk ke dalam penelitian dengan waktu pelaksanaan Cross Sectional. Menurut Spardley dalam (Sugiyono, 2013) penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi namun “social situation” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yakni tempat (place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis. Narasumber dalam wawancara penelitian ini berjumlah 7 orang. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara observasi dan wawancara. Untuk data pada penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama berupa wawancara, sedangkan data sekunder berupa data dari website, jurnal, laporan RPJMD, dan penelitian terdahulu mengenai Kota Tasikmalaya.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dimiliki oleh Kota Tasikmalaya terkait dengan implementasi SPBE

Implementasi Smart Governance di Kota Tasikmalaya didorong oleh sejumlah faktor pendukung berdasarkan temuan penelitian yang meliputi komitmen pemerintah dalam mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK), kesadaran akan pentingnya transparansi dan partisipasi publik, serta adanya dukungan infrastruktur teknologi yang memadai.

Implementasi Smart Government di Kota Tasikmalaya dihadapkan pada beberapa faktor penghambat pada pelaksanaannya, terutama pada domain 2 yang menunjukkan bahwasannya kurangnya tingkat kematangan rencana dan Anggaran SPBE, lalu kurangnya sistem integrasi penghubung antara pemerintahan pusat dan daerah, dan yang terakhir pada pembentukan tim koordinasi yang masih sangat rendah dalam penilaiannya. Selain itu juga, tingkat penerapan

manajemen SPBE dalam aspek 5 menyatakan bahwasannya masih menandakan tingkat kematangan audit TIK SPBE masih perlu ditingkatkan untuk mencapai standar yang diinginkan

Tabel 3.1 Faktor Pendukung dan penghambat terhadap Aspek Indikator SPBE

No	Aspek Indikator SPBE	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	Peraturan Wali kota Nomor 79 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan wali kota Tasikmalaya Nomor 101 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintahan kota Tasikmalaya	Masih harus dilakukan pengkajian dan perlu direviu untuk diperbaiki dan dilengkapi dengan kebijakan turunan.
2	Perencanaan Strategis SPBE	Dokumen arsitektur SPBE sudah tersedia dan menggambarkan seluruh referensi arsitektur SPBE sesuai acuan Permenpan RB 19/2018	Rencana Anggaran SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Tasikmalaya masih di Tingkat kematangan 2 karena Rencana dan Anggaran SPBE pada perangkat daerah masih belum seluruhnya dikonsultasikan kepada unit pengelola TIK
3	Teknologi Informasi dan Komunikasi	Layanan Pusat Data Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) telah diterapkan di seluruh unit di lingkungan Pemkot Tasikmalaya	Layanan Pusat Data masih belum diintegrasikan dengan Layanan Pusat Data Nasional atau Pusat Data Pemerintah Daerah lainnya
4	Penyelenggara SPBE	Kolaborasi penerapan SPBE antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah dibentuk secara formal melalui SK Walikota.	Tim Koordinasi SPBE sudah dibentuk secara formal melalui SK Walikota, hanya saja belum semua program kerja sudah dilaksanakan sesuai rencana yang tertulis di Peta Rencana SPBE
5	Penerapan Manajemen SPBE	Manajemen data dan manajemen aset sudah tertulis di Peta Rencana SPBE dan juga sudah mempunyai pedoman pelaksanaan	Kegiatan Manajemen Perubahan SPBE dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, namun hanya dilaksanakan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah
6	Audit TIK	Kegiatan Audit Keamanan SPBE sudah tercantum pada Peta Rencana SPBE dan menggunakan audit KAMI sebagai instrumennya.	Audit Aplikasi dan audit infrastruktur sudah tercantum dalam Peta Rencana SPBE tetapi masih belum dilaksanakan.
7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah mencapai Tingkat kematangan 4 di Pemkot Tasikmalaya untuk layanan pada masyarakat.	Pemerintah Kota Tasikmalaya masih belum menerapkan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah.
8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah bisa digunakan antara lain e-SPTPD, SIAK dan SIPENTAS	Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah menerapkan semua Layanan Publik Berbasis Elektronik dengan baik, tidak ada kekurangan atau kelemahan di aspek ini.

Sumber: Dibuat Oleh Peneliti (2024)

## B. Strategi implementasi yang dapat dijalankan oleh Tasikmalaya untuk meningkatkan skor SPBE

Secara keseluruhan, penerapan SPBE di Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah baik di Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE, Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Kepala daerah beserta semua jajarannya terlihat mempunyai komitmen yang sangat baik di bidang penerapan SPBE. Untuk perbaikan ke depan, Pemkot. Tasikmalaya perlu mengawal pelaksanaan Manajemen SPBE khususnya Aspek Penerapan Manajemen SPBE dan Aspek Audi TIK. Kedua aspek ini harus dijalankan sesuai dengan Roadmap SPBE dan Pedoman Manajemen SPBE yang sudah ditetapkan. Selain itu, audit TIK harus dilaksanakan secara rutin dan dilakukan secara bergantian oleh auditor internal maupun auditor eksternal bersertifikasi.

Pertama, kebijakan internal terkait peta rencana SPBE yang baik mengindikasikan bahwa pemerintah kota Tasikmalaya telah mengembangkan strategi yang terencana dengan baik dalam mengelola infrastruktur SPBE di Kota Tasikmalaya untuk jangka waktu yang panjang. Ini termasuk investasi dalam infrastruktur fisik seperti gudang penyimpanan yang aman serta pengembangan sistem teknologi informasi untuk manajemen data terkait SPBE. Tingkat kematangan kebijakan internal terkait arsitektur SPBE yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah kota telah menetapkan regulasi yang kuat dan prosedur yang jelas terkait dengan produksi, penyimpanan, transportasi, dan penggunaan bahan eksplosif di wilayahnya. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta untuk menghindari insiden atau kecelakaan yang tidak diinginkan.

Kedua, adalah audit TIK yang merupakan proses evaluasi independen terhadap infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE yang menunjukkan sejauh mana pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan penilaian terhadap efektivitas dan keamanan sistem yang ada. Dengan mengaudit secara teratur infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE, pemerintah dapat mengidentifikasi kelemahan, menerapkan perbaikan, dan memastikan bahwa sistem yang ada beroperasi sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ketiga, tingkat kematangan Manajemen data yang efisien memungkinkan pemerintah kota untuk melacak inventarisasi bahan eksplosif dengan tepat, memantau persediaan secara real-time, dan memberikan respons cepat terhadap perubahan atau insiden yang terjadi. Sementara itu, pembangunan aplikasi SPBE dan layanan pusat data yang berkualitas telah mendukung operasional SPBE di Kota Tasikmalaya dengan menyediakan platform teknologi yang handal dan terintegrasi. Pengoperasian jaringan intra-instansi yang lancar dan penggunaan sistem penghubung layanan yang efisien akan memfasilitasi koordinasi antar berbagai unit terkait dalam penerapan kebijakan dan prosedur SPBE. Manajemen keamanan informasi yang baik akan melindungi data terkait SPBE dari ancaman keamanan siber yang mungkin timbul. Terakhir, audit TIK yang teratur akan memastikan bahwa sistem dan proses terkait SPBE dievaluasi secara berkala untuk memastikan kepatuhan, kinerja optimal, dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, keselarasan dan kematangan dalam domain kebijakan internal yang dominan akan membantu Kota Tasikmalaya mencapai penerapan SPBE yang efektif, aman, dan berkelanjutan.

Keempat, dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi, Kota Tasikmalaya menunjukkan kemajuan dari tahun 2022 ke 2023 dengan tingkat kematangan dalam pembangunan aplikasi SPBE dan layanan pusat data (Indikator 15 dan 16). Hal ini mencerminkan upaya untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengelolaan data terkait SPBE. Selain itu, tingkat kematangan dalam layanan jaringan intra-instansi dan penggunaan sistem penghubung layanan (Indikator 17 dan 18) menunjukkan kemampuan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan berbagai unit terkait SPBE.

Kelima, dalam aspek penyelenggara SPBE, Kota Tasikmalaya telah menunjukkan kematangan dalam koordinasi tim serta kolaborasi dalam penerapan SPBE (Indikator 19 dan 20). Ini mencerminkan sinergi antara berbagai pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam upaya mengelola bahan eksplosif dengan efektif dan aman. Dengan demikian, predikat "cukup baik" untuk indeks Domain 2 menunjukkan bahwa Kota Tasikmalaya telah melakukan upaya yang signifikan dalam merencanakan, menerapkan teknologi, dan mengkoordinasikan penyelenggaraan SPBE dengan baik. Meskipun masih ada ruang untuk peningkatan, pencapaian ini memberikan landasan yang kokoh untuk terus meningkatkan efektivitas dan keamanan pengelolaan bahan eksplosif di masa mendatang.

Keenam, dalam aspek domain 4 tentang layanan SPBE, menurut pengguna layanan dari kalangan masyarakat sistem dan pelayanan yang sudah di implementasikan sudah sangat baik. Khususnya pada pelayanan administratif dan pada bagian pelaporan, yang dimana sudah sangat efektif dan efisien pada penerapannya (Indikator 42 sampai Indikator 46). Dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya, sudah dapat menggambarkan predikat SANGAT BAIK dalam penerapan Layanan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa

keunggulan dan kelemahan. Melalui proses revidi dan evaluasi serta perbaikan secara terus menerus, diharapkan untuk tahun berikutnya, Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat mencapai indeks SPBE dengan predikat SANGAT BAIK atau MEMUASKAN.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi SPBE di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 mencapai predikat "sangat baik" dengan berbagai prestasi yang signifikan sedangkan pada 2022 mencapai predikat "baik". Secara keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE pada Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah dilakukan dengan baik. Dari 10 (sepuluh) kebijakan internal SPBE, Pemkot. Tasikmalaya sudah berhasil mencapai Tingkat kematangan 4 dan 5 untuk 8 (delapan) kebijakan. Hal ini karena Pemkot. Tasikmalaya sudah secara berkala melakukan revidi dan perbaikan pada kebijakan lama sampai muncul kebijakan baru maupun kebijakan turunannya. Penerapan Perencanaan Strategis SPBE pada Pemerintah Kota Tasikmalaya hampir sudah terpenuhi semuanya walaupun Tingkat kematangannya masih 3 (belum mencapai level 4) yaitu meliputi ketersediaan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, inovasi proses bisnis SPBE dan Pembangunan Aplikasi SPBE. Kemudian, untuk aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi di Pemkot. Tasikmalaya sudah terpenuhi semua dengan Tingkat kematangan 3 baik untuk layanan Pusat Data maupun Jaringan Intra Pemerintah Daerah. Aspek Penyelenggara SPBE di Pemkot. Tasikmalaya baru 1 (satu) yang sudah terpenuhi yaitu Kolaborasi Penerapan SPBE dengan Tingkat kematangan 3. Sedangkan Sistem Penghubung Layanan dan Tim Koordinasi SPBE masih di Tingkat kematangan 2. Dari 8 indikator pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE, Pemkot. Tasikmalaya baru menerapkan Manajemen Data (Tingkat kematangan 3) dan Manajemen Aset (Tingkat kematangan 3). Sedangkan manajemen SPBE lainnya masih belum dilaksanakan atau sudah dilaksanakan tetapi belum terencana dan belum mengacu pada pedoman. Pemkot. Tasikmalaya sudah menjalankan Audit Keamanan SPBE. Kegiatan audit Keamanan sudah terencana di Roadmap SPBE, sudah dianggarkan dan juga sudah mempunyai pedoman. Pemkot. Tasikmalaya sudah menerapkan hampir semua layanan Administrasi Pemerintahan SPBE dengan baik dengan Tingkat kematangan antara 4 dan 5. Hanya 1 layanan yang belum ada yaitu Layanan Pengawasan Internal Pemerintah. Terakhir, kota Tasikmalaya sudah menerapkan semua layanan Publik berbasis Elektronik dengan baik dengan Tingkat kematangan 4 antara lain Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Layanan Publik 1-3.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat pembangunan dalam pelaksanaan smart governance di Kota Tasikmalaya adalah implementasi Smart Government di Kota Tasikmalaya dihadapkan pada beberapa faktor penghambat, termasuk alokasi anggaran yang tidak mencukupi, tantangan dalam manajemen risiko TI, kurangnya koordinasi antar tim, kesiapan SDM yang kurang, kendala dalam penerapan standar, dan perubahan budaya organisasi yang sulit. Diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pembangunan Smart Governance di Kota Tasikmalaya dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE (nilai 4,20), Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik (nilai 3,60) dan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik (nilai 3,83). Secara keseluruhan, penerapan SPBE di Pemerintah Kota Tasikmalaya mencapai nilai 4,2 untuk domain Kebijakan SPBE dan nilai 3,69 untuk domain Layanan SPBE. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Pemerintah Kota Tasikmalaya menjadi efektif dan efisien, baik dari sisi anggaran maupun kinerja menjadi optimal.

Penerapan SPBE di Pemerintah Kota Tasikmalaya masih mempunyai kelemahan di Aspek Perencanaan Strategis SPBE (nilai 2,75), Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi (nilai 2,75), Aspek Penyelenggara SPBE (nilai 2,50), Aspek Penerapan Manajemen SPBE (nilai=2,25) dan Aspek Audit TIK (nilai 1,67). Secara keseluruhan, Domain Tata Kelola SPBE (nilai 2,70) dan Domain Manajemen SPBE (nilai 1,67) mempunyai nilai kematangan yang lebih rendah disbanding Domain Kebijakan dan Domain Layanan

Berikut adalah saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian untuk Pemerintah Kota Tasikmalaya:

- A. Saran untuk meningkatkan aspek audit TIK yang masih kurang adalah dengan memperkuat kerja sama dengan lembaga atau pihak independen yang memiliki keahlian khusus dalam audit TIK. Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat bekerja sama dengan lembaga audit independen atau ahli TIK yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang mendalam dalam melakukan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE.
- B. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pegawai pemerintah tentang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan pengelolaan bahan eksplosif. Dengan meningkatkan literasi teknologi di seluruh tingkatan pemerintahan, akan lebih mudah untuk

mengoptimalkan manfaat teknologi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta pengelolaan bahan eksplosif.

- C. Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat lebih memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam pengelolaan bahan eksplosif. Ini dapat dilakukan melalui pembukaan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat tentang kebijakan, regulasi, dan kegiatan terkait SPBE, serta melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan melalui konsultasi publik dan mekanisme partisipasi lainnya. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, pemerintah dapat memperoleh masukan berharga dan memperkuat legitimasi kebijakan yang diambil dalam pengelolaan bahan eksplosif.

## REFERENSI

- Agarwal, P. K. (2000). Portals: The path to everything: Government Technology. *Www.Govtech.Net*.
- Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2010). A General Framework for E-Government: Definition Maturity Challenges, Opportunities, and Success. 14.
- Alshehri, M., & Drew, S. (2010). E-GOVERNMENT FUNDAMENTALS. 8.
- BPK SULSEL. (2020). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Subbagian Hukum BPK Provinsi Sulawesi Selatan.
- Candiwan, & Wibisono, C. (2021). Analysis of the Influence of Website Quality to Customer's Loyalty on E-Commerce. *International Journal of Electronic Commerce Studies*, 12(1).
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.  
*Laporan Hasil Evaluasi SPBE 2023 Pemerintah Kota Tasikmalaya*  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.
- Cresswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mix Methods Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications Inc.
- Dawson, C. W. (2015). *Projects in computing and information systems: A student's guide* (Third edition). Pearson.
- Firdaus, M. A. R. (2018). Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Lumajang Menggunakan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi SPBE. Universitas Jember.
- Guo, Y. (2010). E-Government: Definition, Goals, Benefits and Risks. *International Conference on Management and Service Science*, 1–4. <https://doi.org/10.1109/ICMSS.2010.5576557>
- Hapsari, D. W., Yadiati, W., Suharman, H., and Rosdin, D. (2023). The Mediating Impact of Value Chain in The Link Between Corporate Governance and SOE's Performance. *Australasian Accounting Business and Finance Journal* 17(2), 2023, 75-85.
- I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda Paramartha, Anak Agung Ketut Agung Cahyawan, Kadek Suar Wibawa, Putu Gede Arya Sumertha Yasa, Ni Made Swasti Wulanyani, & Ni Wayan Wisswani. (2020). Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 4(2), 243–253. <https://doi.org/10.29207/resti.v4i2.1825>
- Kartiningrum, E. D. (2015). PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN MAJAPAHIT MOJOKERT, 9.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2020). PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2020.
- Krisnawati, A., Yudoko, G., Bangun, Y.R. (2015). Modeling an effective corporate social responsibility in alignment with good corporate governance based on Indonesian legal regulations. *Advanced Science Letters*, 2015, 21(6), pp. 2100–2104.
- Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KEMENPAN. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2018). PERMENPAN RB Nomor 5 Tahun 2018. PERMENPAN. <https://spbe.go.id>  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). Sekilas Peraturan Menteri PANRB No.59 Tahun 2020. PERMENPAN.
- Majidah, Nazar, M.R., Muslih, M., Anggraeni, G. (2016). Earnings quality: Corporate governance perception index, intellectual capital and spiritual values. *Advanced Science Letters*, 2016, 22(12), pp. 4338–4340.

- Manurung, D.T.H., Hardika, A.L., Hapsari, D.W., Sebayang, M.M. (2018). The role of corporate governance and environmental committees on greenhouse gas disclosure. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 2018, 9(7), pp. 1403–1413.
- Mohammad, H., Almarabeh, T., & AbuAli, A. (2009). E-government in Jordan. *European Journal of Scientific Research*, 35(2), 188–197.
- Nugraha, J. T. (2018). E-GOVERNMENT DAN PELAYANAN PUBLIK (STUDI TENTANG ELEMEN SUKSES PENGEMBANGAN E-GOVERNMENTDI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN). *JURNAL KOMUNIKASI DAN KAJIAN MEDIA*, 2, 32–42.
- PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2018.
- Pratiwi, H. D., Putra, W. H. N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 4, 9. *Presiden Republik Indonesia*. (2003). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003.
- Purnama, P. A. W. (2020). Analisis Dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus: Pemerintah Daerah Kota Padang). 10.
- Silalahi, M., Napitupulu, D., & Patria, G. (n.d.). KAJIAN KONSEP DAN KONDISI E-GOVERNMENT DI INDONESIA. 7.
- Sin Tan, K., Choy Chong, S., Lin, B., & Cyril Eze, U. (2009). Internet-based ICT adoption: Evidence from Malaysian SMEs. *Industrial Management & Data Systems*, 109(2), 224–244. <https://doi.org/10.1108/02635570910930118>
- Supriyanto, E. E. (2016). Kebijakan Inovasi Teknologi Informasi (IT) Melalui Program Elektronik Government dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 1, 141–161.
- Utami, S. R. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) pada BDA Sukamandi [Skripsi, Universitas Widyatama]. <https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/11730>
- Widiyarta, A., Robbani, H. I., & Windiastuti, C. E. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI (SIOLA) DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA. *Public Administration Journal of Research*, 2(3). <https://doi.org/10.33005/paj.v2i3.52>